

DAMPAK SOSIAL DAN POLITIK REFORMASI EKONOMI ERA DENG XIAOPING TAHUN 1978-1992¹

Salsa Adelia Fertasari², Arief Musadad³, Isawati⁴

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis (1) latar belakang terjadinya reformasi ekonomi di Cina (2) proses berlangsungnya reformasi ekonomi di Cina (3) perubahan sosial dan politik Cina tahun 1978-1992. Sumber yang digunakan yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa surat kabar digital sezaman antara tahun 1978-1992 yang dapat diakses melalui situs *beijingreview*, *chinatoday*, *kompasiana.com*. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) Terjadinya reformasi ekonomi di Cina tahun 1978 diakibatkan oleh beberapa faktor yang utama yaitu kegagalan kebijakan Mao Zedong dalam keinginannya untuk menjadikan Cina sebagai pusat negara komunis di dunia, kediktatoran Mao dalam memerintah memberikan permasalahan mengenai kemiskinan dan kematian bagi masyarakat Cina saat terjadi Revolusi Kebudayaan. (2) proses berlangsungnya reformasi ekonomi di Cina sebagai tujuan Deng Xiaoping untuk menjadikan negara Cina sebagai sosialisme dengan karakteristik Cina. Perbaikan diawali dalam bidang perekonomian dengan melaksanakan kebijakan pintu terbuka, kebijakan empat modernisasi, dan kebijakan satu anak. (3) perubahan sosial masyarakat tahun 1978-1992 disebabkan oleh adanya penghapusan komune rakyat dan digantikan oleh sistem tanggung jawab yang memudahkan para petani untuk memilih jenis bibit tanaman dan menjual hasil panen sendiri sehingga keuntungan penuh milik petani, taraf kehidupan masyarakat di perkotaan juga meningkat dengan kebiasaan hedonisme memunculkan permasalahan kriminalitas, korupsi serta kemiskinan di wilayah tepencil. Sedangkan perubahan politik terjadi akibat adanya perbedaan pandangan antar golongan dalam partai yang mengakibatkan terhambatnya proses reformasi dan mengakibatkan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1986 dan 1989 di Lapangan Tiananmen.

Kata kunci: Dampak Sosial dan Politik, Reformasi Ekonomi, Deng Xiaoping

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Cina merupakan negara berkembang yang mempunyai kekuatan besar dalam menyebarkan kekuasaannya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaannya di seluruh dunia. Sebelum menjadi negara besar, Cina merupakan negara dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Pada tahun 1949 Cina berubah menjadi negara republik dengan kekuasaan yang dipimpin oleh Mao Zedong. Cina menganut ideologi komunis dengan sistem pemerintahan tertutup dan sistem ekonomi komando atau tertutup. Dalam sistem ekonomi komando, pemerintah berhak

¹ Ringkasan Penelitian Skripsi

² Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret

³ Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret

⁴ Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan FKIP Sejarah Universitas Sebelas Maret

mengontrol aktivitas ekonomi, mengambil kebijakan ekonomi dan mendistribusikan pendapatan sehingga pemerintah dapat menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi dan memilih perusahaan yang akan memproduksi barang dan jasa tersebut (Myers, 2004:288). Hal ini, yang menjadikan Cina sebagai negara tertutup bagi negara liberal lainnya.

Awalnya pemerintahan Mao Zedong yang sentralistik dan berpusat pada industrialisasi yang menyebabkan produktivitas hasil pertanian menurun sehingga banyak daerah otonomi yang tidak berkembang dengan baik. Pembangunan negara Cina mengusung ideologi sosialis industri dengan karakteristik Cina dalam Kongres Partai Komunis ke-8 (Wheelwright&Mc Farlane, 1973:80). Dalam rangka mencegah kebangkitan Kapitalisme di Cina, tahun 1952 Mao mengeluarkan kebijakan gerakan permunian seperti: *Landreform*, Gerakan 100 Bunga dan Gerakan Anti Kanan (1956), Gerakan Pendidikan Sosialis, Lompatan Jauh Kedepan (1957-1960), dan Revolusi Kebudayaan (1966-1969) (Nainggolan, 1995:10). Kegagalan Lompatan Jauh Kedepan mengakibatkan rusaknya citra Mao Zedong sebagai pemimpin Cina dan anggota Partai Komunis Cina. Bagi seorang sosialis otoriter seperti Mao rusaknya citra kepemimpinan di depan rakyat merupakan hal yang berbahaya karena seorang pemimpin harus agung untuk menjamin kepatuhan rakyat terhadap pemerintah dan merupakan alat mobilisasi massa. Mao mengangkat Zhou Enlai sebagai seorang Perdana Menteri dan menyingkirkan Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi dari pemerintahan karena dituduh sebagai seorang kapitalis dan revisionisme. Deng dan Liu melaksanakan kekuasaan eksekutif yang ditinggalkan Mao dengan menetapkan kebijakan baru yaitu kebijakan kolektivitas lahan tahun 1962 di daerah pengasingannya. Deng berusaha untuk mendirikan usaha kecil untuk meningkatkan hasil pertanian dan memperbaiki taraf hidup rakyat yang rusak akibat program Lompatan Jauh Kedepan. Menurut Deng, kapitalisme atau sosialisme tidak menjadi masalah selama dapat menyejahterakan rakyat dan program ekonomi berjalan dengan baik. Pemikiran inilah yang bertolak belakang dengan pemikiran Mao sehingga Deng dan Liu disingkirkan dari pemerintahan politik.

Tahun 1976, Mao meninggal dan membuat Deng kembali ke politik Cina pada Sidang Pleno ke-3 dari Komite Pusat ke-10 tanggal 16-21 Juli 1977, Deng diangkat sebagai Deputy Ketua Komite Pusat dan Komite Militer Pusat, Deputy Perdana Menteri,

dan Kepala Staff umum PLA (Wicaksono, 2017:403) dan secara umum Deng yang mendikte Hua Guofeng (Ketua PKC) dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan saat itu. Deng menerapkan kebijakan *gaige kaifang* atau reformasi keterbukaan dengan merancang program Empat Modernisasi di bidang Pertanian, Industri, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Militer. Deng berusaha memfokuskan pada bidang ekonomi yang menurut Deng lemah dengan sistem ekonomi tertutup. Kebijakan lain yang diterapkan untuk mendukung reformasi ekonomi adalah *One Childe Policy* (Kebijakan Satu Anak), *One Country Two System* (Satu Negara Dua Sistem), *Open Door Policy* (Politik Pintu Terbuka).

Reformasi Ekonomi Deng mengalami pergulatan antar faksi internal Partai Komunis Cina (PKC), yaitu kelompok pragmatis-realis dan konservatif-militer yang berusaha mengubah Cina menjadi negara yang maju dengan pemahaman ideologi yang berbeda. Sedangkan dalam bidang sosial, penghapusan Komune Rakyat, Kebijakan Satu Anak, menimbulkan banyak perubahan dalam masyarakat seperti, urbanisasi, kemiskinan, korupsi, serta munculnya demonstrasi besar di Lapangan Tiananmen 1989 atas meninggalnya Hu Yaobang dan tuntutan mahasiswa agar Deng turun dari jabatannya. Sejak meninggalnya Mao tahun 1976, periode tahun 1978-1992 merupakan tahun peralihan kepemimpinan dengan pembaharuan pembangunan sosialis RRC yang dirancang oleh Deng. Kemunculan kota-kota industri di Cina dan hubungan Cina dengan negara lain membuktikan bahwa reformasi yang dilaksanakan oleh Deng berhasil dan harus berjalan terus dilanjutkan oleh pemimpin Cina selanjutnya.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa kajian teori yang berhubungan dengan Reformasi, Sosialisme, dan Perubahan Sosial.

Reformasi

Istilah reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *reform* yang berarti pembaharuan. Menurut Prasojo (2009:15), reformasi merupakan usaha pembaharuan untuk menuntut yang diharapkan dalam pola yang jelas dan terarah, sehingga keberhasilan reformasi ditandai dengan arah tujuan dan status tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator keberhasilannya sejak awal. Jadi, reformasi merupakan perubahan aktivitas atas ketidakpuasan politik, sosial, ekonomi dan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan masyarakat dan negara yang lebih baik kedepannya.

Reformasi Ekonomi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi ekonomi negara sehingga mencapai pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lapangan pekerjaan. Menurut Bakouf (2013:7), reformasi ekonomi dilaksanakan secara berkelanjutan agar dampaknya abadi. Pelaksanaan reformasi ekonomi harus memahami permasalahan yang terjadi di wilayah tertentu sehingga proses tindakan yang diambil untuk melaksanakan reformasi dilandaskan pada kebutuhan yang tepat serta memiliki dampak pengaruh yang diharapkan, seperti sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem ekonomi kapitalisme memberikan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut Ebenstein (1990; Kristeva, 2010:13), kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menyeluruh bukan hanya sistem perekonomian yang dikaitkan dengan aktivitas individualisme tetapi juga dalam akumulasi kapital yang lebih menguntungkan.

Sosialisme

Menurut Karl Marx (Suseno, 2001:270) sosialisme merupakan aturan atau hukum yang diteliti dan diperlihatkan dalam perkembangan masyarakat dan akan muncul dalam setiap lapisan masyarakat atau kelas. Sosialisme modern muncul pada abad ke-19 sebagai reaksi kondisi masyarakat kapitalisme liberal dan pengaruh industrialisasi yang berkembang dengan pesat namun kesejahteraan masyarakat pekerja semakin menurun (Adams, 1993:159). Sistem politik sosialisme dilandaskan dengan prinsip komunal yang ditandai dengan kepemilikan alat produksi dan distribusi secara kolektif (Deliarnov, 2006:39). Masyarakat sosialisme memiliki ciri kebersamaan dalam bentuk komunisme, yaitu kebijakan ekonomi diatur dan dikontrol oleh negara.

Sistem perekonomian sosialisme memberikan kebebasan pada masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi tetap dalam kontrol pemerintah. Pemerintah mengatur perekonomian negara, industri, dan hajar hidup orang banyak, seperti air, listrik, telekomunikasi. Sosialisme ekonomi dianggap sebagai ekonomi campuran yang tetap menerapkan kepemilikan publik dan Partai Komunis yang dominan namun memperbolehkan sistem pasar yang diatur oleh kebijakan publik dengan bentuk pluralisme politik.

Perubahan Sosial Politik

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial merupakan perubahan dalam pranata masyarakat yang mempengaruhi perilaku dan sistem diantara kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Karl Marx (Soekanto, 1974:96), perubahan sosial terjadi diakibatkan oleh perkembangan teknologi dan hubungan antar kelas sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat ditentukan oleh produksi barang material yang ditentukan oleh tenaga produktif dan selanjutnya menentukan sistem ekonomi masyarakat. Tahap perkembangan masyarakat dimulai dari tahap primitif, masyarakat perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Perubahan sosial dapat berjalan dengan cepat atau lambat dan dapat mengakibatkan disorganisasi karena mengalami penyesuaian diri.

Pada dasarnya perubahan politik meliputi perubahan rezim atau sistem pemerintahan atau perubahan keduanya (Marzan, 2011:116). Perubahan politik dalam sistem pemerintahan mempunyai arti bahwa sekelompok orang mengambil alih pemerintahan yang dapat mengatur kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial. Sedangkan, perubahan rezim memberikan proses perubahan menyangkut bidang ekonomi, sosial dan politik yang ditandai dengan perubahan cara lama untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara sebelumnya. Perubahan politik dapat terjadi setiap beberapa tahun sekali yang akan diikuti oleh kekacauan sosial atau demonstrasi. Faktor yang menyebabkan perubahan politik adalah Ideologi/organisasi dan perkembangan sains dan teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis karena mengkaji peristiwa masa lampau dalam kurun waktu tertentu. Metode berkaitan dengan mengamati objek penelitian yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1977:16). Metode sejarah merupakan aturan penulisan yang sistematis untuk mengumpulkan berbagai sumber sejarah secara efektif, menilainya dengan kritis dan menyajikan sintesis dari hasil dalam bentuk historiografi (Kuntowijoyo, 2013:81). Prosedur penulisan sejarah termuat dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber data, kritik ekstern dan intern, analisis dan interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013:64). Penelitian ini menggunakan sumber primer diantaranya surat kabar digital sezaman antara tahun 1978-1992 yang diakses melalui situs *beijingreview*, *chinatoday*, *kompasiana.com*. sumber sekunder berupa buku-buku yang menunjang penelitian ini diantaranya seperti (1) *Reformasi Ekonomi Era Deng Xiaoping; Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi*, karya

Poltak Partogi Nainggolan, (2) *Republik Rakyat China: Dari Mao Zedong sampai Xi Jinping*, karya Michael Wicaksono, (3) *Berita Dari Tembok Besar*, karya Dahana A, (4) *Pembantaian Tiananmen*, karya Michael Fathers. Adapun sumber sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Reformasi Ekonomi

1. Kegagalan Kebijakan Mao Zedong

Kebijakan sentralistik dan diktator yang diterapkan Mao Zedong selama pemerintahan tahun 1949-1976 mengalami banyak permasalahan yang membuat Cina menjadi negara tertutup dan terasingkan dari negara lain. Mao beranggapan bahwa politik merupakan alat utama dalam menjalankan pembangunan sebuah negara, seperti Mao tetap memberikan dukungan terhadap perang Korea walaupun keadaan ekonomi Cina sedang terpuruk pada masa *Landreform*. Pada masa Repelita I, Cina berusaha meniru program repelita Uni Soviet dengan fokus pembangunan di bidang Industri berat dan sarana perhubungan. Keberhasilannya dalam menjalankan program Repelita I menjadikan acuan dalam pelaksanaan kampanye politik Mao selanjutnya yakni program Repelita II atau Lompatan Jauh Ke Depan dengan tujuan untuk mewujudkan komunisme dan ekonomi sosialis. Target yang dicapai adalah keseimbangan peningkatan industri yang diiringi dengan perkembangan produksi pertanian. Mao membentuk Komune Rakyat sebagai organisasi untuk mengontrol kebutuhan konsumsi dan produksi, distribusi pertanian pada para petani dan masyarakat (Nainggolan, 1995:67). Keberadaan Komune Rakyat memberikan ancaman bagi keberhasilan Lompatan Jauh Ke Depan. Para petani dipaksa bekerja terlalu keras, kurangnya keterampilan dalam penggunaan mesin, keterbatasan modal, bencana alam seperti kekeringan, serta kelaparan mengakibatkan kematian sekitar 10 juta orang akibat program Lompatan Jauh Ke Depan (Kompas, 1987:7). Pada Sidang Pleno Komite Sentral Kesepuluh 1962 menimbulkan pertikaian antara kebijakan mobilisasi dan mendukung kebijakan kelembagaan yang menimbulkan konflik berwujud Revolusi Kebudayaan (Townsend, 1993:185).

Kegagalan Lompatan Jauh Ke Depan mengakibatkan Mao mengundurkan diri dari Ketua Umum RRC walaupun seperti itu Mao tetap menjadi pemimpin

yang diagungkan oleh Rakyat. Revolusi Kebudayaan berjalan meliputi segala aspek kebudayaan, sosial, ekonomi dan pendidikan diubah agar tidak terjadi restorasi kapitalisme seperti Uni Soviet. Doktrinisasi pemikiran Mao digencarkan dengan pembuatan Buku Merah Kecil (*The Little Red Book*) yang berisi kutipan perkataan Mao dan segala tindakan anggota *Pengawal Merah* harus dipatuhi oleh masyarakat Cina. Kekacauan yang dilakukan oleh *Pengawal Merah* mengakibatkan kerugian bagi Cina pada kehidupan sosial muncul permasalahan di lingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh *Pengawal Merah*, segi ekonomi mengalami kemunduran dalam industri dan pertanian dan segi politik muncul fraksi-fraksi politik yang memiliki kepentingan yang berbeda dan banyak elit partai yang diasingkan ke daerah pedalaman seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping.

2. Perubahan Uni Soviet sebagai Kiblat Sosialisme Dunia

Di tahun 1940-an Uni Soviet menjadi pusat komando komunisme bagi negara komunis di dunia terutama Cina, Korea Utara dan Vietnam. Mao beranggapan bahwa Cina dapat meniru konsep revolusi Uni Soviet dan menjadikannya negara komunis terbesar di dunia. Mao berambisi bahwa Cina dapat menjadi negara komunisme terbaik di dunia tanpa campur tangan orang asing. Namun, saat Uni Soviet berada pada pemerintahan Nikita Krushchev, Mao mulai tidak menyukai Uni Soviet karena dianggap telah berubah menjadi negara kapitalis dan penganut “Revisionisme” (Sukisman, 1993:83). Sehingga di tahun 1960-an terdapat keretakan antar negara sosialis yang diprakarsai oleh Uni Soviet yang mengakibatkan Partai Komunis Cina tidak mengakui kepemimpinan Partai Komunis Uni Soviet dalam gerakan komunisme Internasional.

3. Faktor Kepemimpinan

Munculnya kekuatan politik baru dalam tubuh PKC yang mengakibatkan kondisi politik di Cina tidak stabil dengan adanya kelompok-kelompok baru, seperti kelompok Pragmatis-Realis yang dipimpin oleh Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi, kelompok Revolusioner-Radikal yang terdiri dari kelompok empat pendukung Maoisme dan Kelompok Moderat atau kelompok yang tidak bersikap ekstrim dan mencegah radikalisme dipimpin oleh Hua Go Feng dan Zhou Enlai. Sebelum Ketua Mao meninggal di tahun 1976 dan Mao menunjuk Hua Go Feng

sebagai perdana menteri karena menghindari pertentangan antara kelompok pragmatis-realis dengan kelompok revolusioner-radikal. Keputusan Sidang Pleno ke-3 Komite Sentral ke XI 1978 menyatakan perubahan dogmatisme ke arah pragmatisme yang merupakan awal kepemimpinan Deng Xiaoping.

B. Proses Berlangsungnya Reformasi Ekonomi

Kepemimpinan Deng Xiaoping berfokus pada perbaikan di bidang ekonomi dan membentuk Cina sebagai negara dengan kekuatan baru dan basis industri di Asia Timur pasca Revolusi Kebudayaan (Sutopo, 2012:116;Tisdell,2008:4). Legitimasi pemimpin Deng Xiaoping didapatkan melalui rekan sejawatnya dari TPR dan juga kelompok pragmatisme PKC. Dengan begitu, stabilitas politik dapat tercapai tanpa menghambat proses reformasi ekonomi sebagai syarat menjadi sebuah negara modern. Kebijakan yang dikeluarkan dalam keberlangsungan reformasi antara lain: Kebijakan Pintu Terbuka (*Open Door Policy*), Kebijakan Empat Modernisasi, Kebijakan Satu Anak (*One Child Policy*), Kebijakan Satu Negara Dua Sistem (*One Country Two System*).

Kebijakan Pintu Terbuka dilaksanakan untuk meningkatkan semangat persaingan dan kebebasan masyarakat dalam meningkatkan kuantitas kerja untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, seperti: Amerika Serikat, Uni Soviet, Korea Selatan, dan Jepang. Kebijakan Pintu Terbuka memberikan kemudahan untuk pelaksanaan Empat Modernisasi di bidang Pertanian, Industri, Ilmu Pengetahuan dan Pertahanan Militer. Proses modernisasi Empat Modernisasi berlangsung pada 1978-1992 dengan berbagai tahapan yang termuat dalam rencana lima tahun pemerintah Deng Xiaoping (Deng Xiaoping,1993c;LeBel,1998;Tisdell,2008:7). Tahapan *pertama*, pembentukan kader-kader partai menjadi tokoh birokrat dengan pemberian pelatihan, pengiriman belajar ke perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri. Tahun 1978-1985, pemerintah Cina menyediakan penelitian ilmiah dan teknologi untuk mengembangkan penerapan teknologi baru, pengembangan mutu pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya untuk memperkuat pembangunan nasional. Tahapan *Kedua*, pemerintahan fokus pada militer dan pertahanan pada tahun 1986-1992 dengan mengadakan pemulihan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dalam rangka kerja sama di bidang militer terutama pengadaan alat utama

sistem persenjataan dan pertahanan. Deng Xiaoping berusaha menstabilkan politik dalam negeri dan kualitas pemerintahan terlebih dahulu sebelum empat modernisasi benar-benar dilaksanakan.

Setelah berjalannya, empat modernisasi membuat Cina sebagai negara superpower di Asia Timur dengan mengganti fokus dogmatis ideologi menjadi pembangunan yang manusiawi dalam mencapai kemajuan (Bakri, 1996:5-6). Deng memberikan kebebasan ekonomi dengan mengizinkan perusahaan swasta dan investor asing di Cina untuk mendorong kegiatan perekonomian nasional dan berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan negara Amerika Serikat, Jepang, Uni Soviet. Keterbukaan dengan pihak asing memberikan dampak bagi wilayah Cina Selatan yang disebut sebagai *Special Economic Zone (SEZ)* (Beijingreview, 23 Januari 1984:1).

C. Perubahan Sosial dan Politik Cina Tahun 1978-1992

1. Kondisi Sosial Masyarakat (1978-1992)

Pemerintahan Deng menghapuskan Komune Rakyat dan memperkenalkan sistem pertanian baru yaitu “Sistem Tanggung Jawab” (Kompas, 7 Januari 1985:7). Kebijakan Tanggung Jawab inilah yang terbukti meningkatkan pendapatan para petani karena dalam sistem Tanggung Jawab, petani tidak lagi bekerja dengan komune melainkan melakukan kesepakatan dengan pemerintah administratif setempat untuk mengerjakan tanah dan mendapatkan keuntungan langsung. Hasil output pertanian tahun 1982 mengalami kenaikan sebesar 12% atau 161 juta ton dibanding tahun 1981 (Kompas, 3 Januari 1985:7).

Perubahan kehidupan sosial masyarakat terjadi secara tidak merata, khususnya di daerah Special Economic Zone (SEZ's), sehingga menurut Perdana Menteri Zhao Zi Yang, muncul banyak permasalahan dalam masyarakat Cina akibat ketimpangan perekonomian antar wilayah, seperti kemiskinan, urbanisasi, dan korupsi. Kemiskinan melanda daerah prefektur Chuxian di Provinsi Anhui yang diakibatkan oleh dampak kekeringan sehingga hasil produksi pertanian wilayah Chuxian gagal. Namun, di wilayah setelah diberlakukannya sistem tanggung jawab maka produksi pertanian meningkat dan standar hidup masyarakat ikut meningkat.

Tahun 1988 kondisi perekonomian RRC dalam kondisi kurang baik, angka pengangguran dan urbanisasi meningkat mengakibatkan muncul kekhawatiran dalam masyarakat. Sehingga kelompok reformis melaksanakan perubahan struktural dalam perusahaan dan desentralisasi ekonomi. Masalah-masalah yang diakibatkan oleh migran adalah pencurian, demonstrasi, pemogokan kerja, pemanfaatan fasilitas umum (Kompas, 5 Maret 1997:12). Selain masalah dikehidupan masyarakat kelas bawah, muncul juga masalah dalam pejabat pemerintahan seperti tindakan korupsi. Korupsi dalam partai Cina diawali oleh slogan *getting rich is glorious* atau menjadi kaya itu mulia, sehingga saat mempengaruhi para kader politik untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Sekitar tahun 1980-an, tindak korupsi paling banyak muncul dalam bidang perbankan, perpajakan, praktik nepotisme, dll (Sullivan, 1984:607).

2. Kondisi Politik Cina (1978-1992)

a. Muncul Konflik Internal PKC

Partai Komunis Cina (PKC) merupakan partai tunggal yang dimiliki oleh Cina sehingga dalam perjalanannya memungkinkan adanya permasalahan internal. Munculnya kelompok dalam partai dengan pandangan ideologi yang berbeda membuat Deng harus bersikap sebagai penengah yang adil dan bijaksana. PKC terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok reformis merupakan kelompok yang mendukung pelaksanaan Reformasi Ekonomi, Kelompok Konservatif dan Militer merupakan kelompok yang berusaha mempertahankan ajaran Maoisme.

Perbedaan pandangan antar kelompok terlihat dari beberapa pertemuan Kongres Nasional PKC ke-11 Sidang Pleno ke-1 tahun 1977 terjadi pemecatan terhadap kelompok konservatif yang tergabung dalam kelompok empat yaitu Jiang Qing, Zhang Zhungqiao, Wang Hung Wen, dan Yao Wenyuan. Hal tersebut diakibatkan karena kelompok empat berusaha untuk menjatuhkan Deng sejak Mao masih menjadi pemimpin. Kongres Nasional PKC ke-12 Sidang Pleno ke-6 Tahun 1982 terjadi perselisihan antar Hu Yaobang (kelompok reformis) dan Chen Yun (kelompok militer) mengenai perkembangan reformasi ekonomi dengan

melanjutkan Repelita Ketujuh atau meningkatkan kader partai dalam usaha pembangunan ekonomi yang selanjutnya dimenangkan oleh kelompok reformis dengan ditunjuknya Hu Yaobang sebagai Sekjen PKC. Kongres Nasional PKC ke-13 Tahun 1987 terjadi perubahan kepemimpinan dalam partai PKC mulai turunnya Deng sebagai ketua, penggantian Sekjen Hu Yaobang dengan Zhao Zi Yang, dan permasalahan demonstrasi di Lapangan Tiananmen 1989 yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini mengakibatkan posisi kelompok konservatif militer lebih dominan karena Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) dalam usaha meredam demonstrasi untuk mengembalikan otoritas partai.

b. Kebijakan yang diambil oleh Deng Xiaoping dalam menangani masalah Internal

Permasalahan internal dalam tubuh PKC membuat Deng harus mengambil kebijakan agar proses reformasi struktural dapat berjalan dengan lancar, seperti halnya pada Kongres Nasional PKC ke-12 dan Kongres Nasional PKC ke-13, Deng membuat beberapa badan atau Komite, yaitu Komisi Penasehat Nasional dan Komite Investigasi Disiplin Pusat.

Komisi Penasehat Nasional berfungsi sebagai pemberi bantuan dan nasehat publik untuk komite sentral partai, anggotanya dipilih dari kader partai tertinggi. Sedangkan, Komite Investigasi Disiplin Pusat bertugas untuk mengawasi program reformasi ekonomi, urusan politik Deng Xiaoping dan mengawasi tindakan korupsi oleh para pejabat partai. Selanjutnya, pemecetan kader-kader partai yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan Deng Xiaoping, seperti Deng Liqun yang diturunkan dari Kepala Departemen Propaganda PKC karena kritiknya tentang kebijakan politik pintu terbuka dan diturunkannya Hu Yaobang yang dianggap mendukung demonstrasi mahasiswa di Lapangan Tiananmen 1989.

c. Pengaruh Konflik Internal dalam PKC

Perdebatan antar kelompok reformis dan konservatif militer dalam partai mengakibatkan ketidakstabilan politik dalam partai dan secara tidak

langsung berakibat pada ketidakstabilan nasional. Menurunnya kontrol atas keberadaan partai dalam pengambilan kebijakan mengakibatkan terjadinya demonstrasi pelajar dan mahasiswa pada tahun 1986 dan 1989. Demonstrasi 1986 terjadi akibat adanya inflasi, korupsi dan tuntutan menyelenggarakan pemilu yang demokratis (Nainggolan, 1995:145).

Peristiwa Lapangan Tiananmen 1989 merupakan peristiwa demonstrasi terbesar sepanjang masa perang dingin. Demonstrasi di Lapangan Tiananmen 1989 diikuti oleh para mahasiswa yang merasa kehilangan atas meninggalnya Sekjen PKC Hu Yaobang secara tiba-tiba dan juga pemberantasan atas korupsi, inflasi, dan liberasi ekonomi negara yang diperintah secara otoriter Leninis (Wright, 2011:189). Mahasiswa mengundang beberapa pembicara untuk melakukan orasi publik untuk memperingati Hu Yaobang pada bulan Mei 1989 serta munculnya tujuh draft tuntutan kepada pemerintah. Para demonstran menuntut kemunduran Deng Xiaoping dari kekuasaan PKC dan liberalisasi politik. Hal ini dituruti oleh Deng, maka sejak tahun 1989 Deng tidak lagi tampil pada pemerintahan politik walaupun dia tetap memegang kendali penuh atas jalannya reformasi ekonomi.

Dalam mengatur demonstran Deng memerintahkan Li Peng dan anggota TPR untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan demonstrasi dengan memperbolehkan menggunakan tindakan apapun untuk mencapai ketertiban. Sehingga, demonstrasi di Lapangan Tiananmen 1989 menjatuhkan banyak korban jiwa akibat ditembaki senjata AKS-47 dan tipe 56 oleh TPR kepada para demonstran dan para demonstran menyerang balik dengan menggunakan batu, tongkat, dan membakar kendaraan militer (Dillon, 2015:278). Berdasarkan kesaksian Komite Intelejen Kementerian Keamanan Negara, peristiwa Tiananmen 1989 telah disusupi oleh kelompok liberalis borjuis dan CIA tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan diktator proletar rakyat (Wicaksono, 2017:473). Berdasarkan media massa, terdapat ratusan korban jiwa, sekitar 5.000 anggota TPR luka-luka, 2.000 masyarakat luka-luka, 10 orang anggota tewas, 13 anggota polisi tewas dan 100 masyarakat tewas (Nathan, 2001:43).

Dampak dari peristiwa Tiananmen 1989 adalah World Bank menanggukkan pinjaman Cina, Jepang menanggukkan pinjaman 6 miliar dollar AS, pendapatan pariwisata turun sebesar 1 miliar USD dan mundurnya para investor dari negara lain (Naisbitt,1990:176).

3. Pengaruh Kebijakan Ekoomi Sosialis masa Deng Xiaoping

Kebijakan Deng adalah menggunakan sistem ekonomi pasar yang digabungkan dengan sistem sosialisme dengan kapitalisme. Menurut Deng, sosialisme dalam sebuah negara dapat diperjuangkan kondisi perekonomiannya, untuk mencapai masyarakat sosialis yang sesungguhnya. Dampak kebijakan reformasi ekonomi Deng Xiaoping telah membawa Cina menjadi negara yang dapat bersaing dengan negara adidaya seperti Amerika dan Uni Soviet. Pelaksanaan politik pintu terbuka telah berhasil mengubah model pembangunan lama yang banyak mengutamakan ideologi dengan model pembangunan baru yang lebih kapitalis. Wilayah SEZ's sebagai wilayah pusat perkembangan industri dan perekonomian telah berhasil membuat Cina masuk dalam organisasi perdagangan internasional, seperti World Trade Organization (WTO) dan International Moneter Federation (IMF). Selain itu, perusahaan minyak asing menjalin kerjasama dalam eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Cina. Sehingga, pada Maret 1985 Cina dapat menandingi komoditas ekspor Taiwan dan dapat memenuhi permintaan pasar Hongkong, Inggris, Perancis, Amerika Serikat dan Irlandia (Nainggolan, 1995:162).

Konflik dalam internal PKC yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan menjadi hambatan dalam pelaksanaan reformasi ekonomi. Seperti halnya, peristiwa pemberontakan di Lapangan Tiananmen 1989 yang dipelopori oleh mahasiswa dan mencapai puncaknya pada kematian Hu Yaobang dan berlanjut hingga bulan Mei-Juni 1989 dengan tuntutan pemerintah harus melaksanakan pembaruan politik (Kompas, 20 April 1989:1). Dampaknya, negara Cina gagal mendapatkan modal investasi dari beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang serta pemberontakan Tiananmen berhasil membuat Deng bersembunyi dari kursi pemerintahan dan kembali lagi ke pemerintahan di tahun 1992 dengan melaksanakan perjalanan ke selatan.

SIMPULAN

1. Latar belakang reformasi ekonomi Cina diawali dengan ambisi Mao Zedong menjadikan Cina sebagai negara komunis yang dapat berdiri sendiri seperti Uni Soviet menjadi pusat komando komunisme di dunia. Keinginan Mao tersebut dipraktekkan dalam beberapa kebijakan yang akhirnya menjadikan Cina sebagai negara terbelakang dan tertinggal di dunia. Awalnya, kebijakan yang diterapkan adalah Repelita I yang mengikuti pelaksanaan pembangunan di Uni Soviet. Namun, kebijakan tersebut mengalami kegagalan karena perbedaan kondisi wilayah dan masyarakat. Kegagalan tersebut menjadikan bentuk perjuangan baru Cina dengan melalui penerapan ideologi komunisme dan sosialisme dengan karakteristik Cina. Mao Zedong melaksanakan kebijakan sentralistik dan diktator, seperti masa Landreform, Gerakan Seratus Bunga, Lompatan Jauh Ke Depan, dan Revolusi Kebudayaan sebagai bukti keradikalan Mao Zedong dalam menerapkan kebijakannya di masyarakat Cina. Namun, kebijakan Revolusi Kebudayaan lah yang menjadikan Cina sebagai negara hancur akibat proses pertanian yang diatur oleh pemerintah sehingga mengakibatkan kelaparan dan kematian masyarakat Cina. Perubahan pandangan Mao terhadap negara Uni Soviet karena dianggap bertindak revisionisme dengan menerapkan kapitalisme dalam kehidupan bernegara membuat Mao memutuskan hubungan dengan Uni Soviet. Selanjutnya, munculnya perbedaan pandangan dari tokoh-tokoh partai mengenai pandangan ideologi Cina yang dianggap menghambat pertumbuhan Cina membuat Mao mundur dari kepemimpinan RRC dan mengangkat Hua Gu Feng sebagai penggantinya, namun pada tahun 1978 Deng menjadi Ketua PKC dengan ambisi untuk membentuk negara Sosialis dengan karakteristik Cina.
2. Proses berlangsungnya reformasi ekonomi diawali Deng Xiaoping menjadi pemimpin Cina dengan melanjutkan pemikiran Zhou Enlai pada tahun 1976. Tujuannya untuk menjadikan Cina sebagai negara sosialisme dengan sistem ekonomi liberal yang berhasil disahkan pada Kongres Nasional PKC ke-11 Tahun 1978. Rancangan Deng dilaksanakan untuk mengurangi kontrol ideologi komunis dengan memberikan kebebasan pada masyarakat di bidang perekonomian, khususnya bidang pertanian dan industri. Kewenangan Deng didapatkan dari teman sejawatnya dari TPR ataupun kelompok pragmatis PKC. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Deng untuk melancarkan proses

reformasi ekonomi, antara lain: Kebijakan Pintu Terbuka (*Open Door Policy*) yang berhasil membuat Cina menjalin hubungan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat dan Eropa, selanjutnya diberlakukannya kebijakan Empat Modernisasi yang meliputi, modernisasi bidang pertanian, modernisasi bidang industri, modernisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan modernisasi pertahanan militer. Program empat modernisasi berhasil membuat Cina menjadi negara yang lebih maju terutama di bidang pertanian dan industri. Keterbukaan Cina terhadap negara lain memberikan pengaruh bagi wilayah Cina Selatan dengan adanya wilayah ekonomi khusus (SEZ's) sebagai pusat perekonomian dan industri di Cina.

3. Perubahan Sosial dan Politik Cina selama masa reformasi ekonomi telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Diawali dengan penghapusan Komune Rakyat yang dianggap memberatkan kegiatan pertanian warga Cina maka digantikan dengan kebijakan Sistem Tanggung Jawab memberikan kemudahan para petani untuk menjual hasil panennya secara langsung dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Keberadaan wilayah ekonomi khusus (SEZ's) memberikan perbedaan kehidupan antara masyarakat kota dengan pedesaan. Kehidupan kota yang hedonisme karena perkembangan industri perekonomian meningkat, banyak pabrik yang berdiri, kebebasan dalam mencari pekerjaan membuat masyarakat Cina hidup dalam kekayaan. Sehingga, dalam kehidupan perkotaan muncul permasalahan sosial seperti, korupsi, urbanisasi, kriminalitas bahkan kemiskina bagi penduduk di wilayah pinggiran terutama di wilayah Anhui. Reformasi ekonomi juga mempengaruhi kondisi politik Cina dengan munculnya konflik antara kelompok dengan ideologi yang berbeda dan berusaha untuk menjatuhkan kedudukan Deng Xiaoping. Misalnya, menurunnya kontrol atas keberadaan partai dalam pengambilan kebijakan menyebabkan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1986 dan 1989.

DAFTAR PUSTAKA

- Beijing review, 23 Januari 1984, hlm 3-5
Kompas, 7 Januari 1985, hlm 7
_____, 3 Januari 1985, hlm 7
_____, 5 Maret 1997, hlm 7

_____, 20 April 1989, hlm 1

- Adams, Ian. (1993). *Ideologi Poliik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan*, Alih Bahasa Ali Moerzaman. Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Bakri, U. S. (1996). *Cina, Qua Vadis? Pasca Deng Xiaoping*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dillon, M. (2015). *Deng Xiaoping: The Man Who Made Modern China*. New York: I.B Tauris&Co. Ltd.
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit: PT. Tiara Wacana.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso. (2010). *Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Anarkisme dan Marxisme, Konservatisme*. Penerbit Eye on The Revolution Press Institute for Philosophical and Social Studies (INPHISOS).
- Nainggolan, Poltak Partologi. (1995). *Reformasi Ekonomi Era Deng Xiaoping: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan
- Naisbitt, J. &. (1990). *Megatrends 2000: Sepuluh Arah Bar Untuk Tahun 1990-an* (Penerjemah: F.X Budijanto). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Nathan, A. J. (2001). The Tiananmen Papers. *Foreign Affairs*, Vol. 80, No.1., 2-48.
- Prasojo, E. (2009). *Reformasi Kedua "Melanjutkan Estafet Reformasi"*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sukisman. (1993). *Sejarah Cina Kontemporer Jilid 2 (Dari Revolusi Nasional Melalui Revolusi Kebudayaan sampai Modernisasi Sosialis)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sullivan, L. (1984). The Role of the Control Organs in the Chinese Communist Party, 1977-83. *Asian Survey*, Vol.24, No 6. University of California Press, 597-617.
- Suseno, Magnis Franz. (2001). *Pemikiran Karl Marx, dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Townsend, J. R. (1993). Sistem Politik Cina. In C. MacAndrews, & M. Mas'ood (Ed.), *Perbandingan Sistem Politik* (pp. 173-199). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Wicaksono, Michael. (2017). *Republik Rakyat China (1949-sekarang); Dari Mao Zedong sampai Xi Jinping*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wright, D. C. (2011). *The History of Cina; Second Edition*. Greenwood.

